



DINAMIKA KEPEMIMPINAN XI JINPING DALAM KONTEKS MOBILISASI SUMBER DAYA NASIONAL: ANALISIS TEKNOKRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA

Robinson H. Etwiory, Febi Andrianto, Tarsisius Susilo,

Sarwo Supriyo, Anton Bimo Risandi

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dan dampaknya terhadap mobilisasi sumber daya nasional di Tiongkok, dengan fokus pada strategi Military-Civil Fusion (MCF). Menggunakan kerangka teoritis multi-dimensi yang mengintegrasikan kepemimpinan transformasional (Burns, 1978; Bass, 1985), kepemimpinan adaptif (Heifetz, 1994), dan kepemimpinan strategis militer (Yarger, 2006), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Xi Jinping telah secara sistematis mengkonsolidasikan kekuatan dan mengarahkan sumber daya nasional untuk mencapai supremasi teknologi dan modernisasi militer. Penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi strategis dari model Tiongkok bagi Indonesia, yang sedang berupaya memperkuat kebijakan pertahanannya menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui analisis komparatif yang didukung oleh tools analisis sistematis Fishbone Analysis (Ishikawa, 1968), Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1980), dan SWOT Analysis (Humphrey, 2005) penelitian ini mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi Indonesia dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun model Tiongkok tidak dapat direplikasi secara langsung, prinsip-prinsip sinergi, fokus strategis, dan inovasi teknologi dapat diadaptasi dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian ini mengusulkan konsep "Teknokrasi Pancasilais" sebagai model alternatif yang mengintegrasikan efisiensi teknokratis dengan nilai-nilai Pancasila, serta "Doktrin Pertahanan Nusantara 4.0" sebagai kerangka konseptual untuk transformasi pertahanan Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis multi-teoritis yang komprehensif, penggunaan metodologi campuran yang sistematis, dan formulasi rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks Indonesia.

Kata Kunci: Kepemimpinan Xi Jinping, Teknokrasi, Mobilisasi Sumber Daya Nasional, Military-Civil Fusion, Kebijakan Pertahanan Indonesia.

*Correspondence Address : etwiory@yahoo.com

DOI : 10.31604/jips.v12i11.2025. 4389-4398

© 2025UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai oleh pergeseran kekuatan global yang signifikan, dengan kebangkitan Tiongkok sebagai aktor utama yang menantang tatanan internasional yang telah mapan (Mearsheimer, 2014). Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok telah menunjukkan ambisi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi kekuatan global yang dominan, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara teknologi dan militer (Shambaugh, 2013). Visi Xi tentang "rejuvenasi besar bangsa Tiongkok" telah mendorong serangkaian reformasi yang mendalam, yang bertujuan untuk memobilisasi seluruh sumber daya nasional guna mencapai tujuan strategis jangka panjang (Wang, 2016).

Salah satu pilar utama dari strategi Xi Jinping adalah pendekatan teknokratis yang menekankan pada penguasaan sains dan teknologi sebagai kunci kekuatan nasional (Hsiung, 2017). Pendekatan ini diwujudkan dalam konsep "kekuatan produktif berkualitas baru" (new quality productive forces), yang memprioritaskan inovasi teknologi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan modernisasi (Brookings Institution, 2024) [28]. Untuk mengoordinasikan upaya ini, Xi telah membentuk Komisi Sains dan Teknologi Pusat (Central Science and Technology Commission-CSTC), sebuah badan yang kuat yang dirancang untuk mengintegrasikan upaya inovasi di seluruh negeri (MacroPolo, 2024).

Dalam konteks pertahanan, pendekatan teknokratis ini termanifestasi dalam strategi Military-Civil Fusion (MCF), sebuah upaya

ambisius untuk mengintegrasikan sektor sipil dan militer guna mempercepat modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army - PLA) (U.S. Department of State, 2020). Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan antara industri pertahanan dan sektor komersial, memungkinkan transfer teknologi dua arah, dan memobilisasi perusahaan teknologi swasta untuk mendukung penelitian dan pengembangan (R&D) pertahanan (Bitzinger, 2021). Hasilnya adalah kemajuan pesat dalam kemampuan militer Tiongkok, yang semakin disegani di kawasan Asia dan dunia (Tan, 2018).

Bagi Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan kekuatan maritim yang strategis, kebangkitan Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, modernisasi militer Tiongkok yang pesat dan kehadirannya yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan menimbulkan kekhawatiran keamanan yang signifikan. Di sisi lain, model mobilisasi sumber daya Tiongkok yang efektif menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia, yang juga sedang berupaya untuk memodernisasi militernya dan membangun industri pertahanan yang mandiri dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 (Harsono, 2021).

Namun, perbedaan fundamental dalam sistem politik demokrasi di Indonesia versus otoritarianisme di Tiongkok membuat replikasi langsung model Tiongkok menjadi tidak mungkin dan tidak diinginkan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Indonesia dapat belajar dari dinamika kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dan strategi mobilisasi sumber daya nasional Tiongkok untuk memperkuat kebijakan pertahanannya, sambil tetap setia pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap model kepemimpinan dan mobilisasi sumber daya di kedua negara. Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis multidimensi yang mengintegrasikan teori kepemimpinan transformasional (Burns, 1978; Bass, 1985), kepemimpinan adaptif (Heifetz, 1994), dan kepemimpinan strategis militer untuk menganalisis kepemimpinan Xi Jinping. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan serangkaian tools analisis sistematis Fishbone Analysis (Ishikawa, 1968), Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1980), dan SWOT Analysis (Humphrey, 2005) untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi Indonesia, menentukan prioritasnya, dan merumuskan strategi untuk mengatasinya.

Kontribusi penelitian ini bersifat tiga lapis. Secara teoritis, penelitian ini mengusulkan model "Teknokrasi Pancasilais" sebagai kerangka konseptual untuk mengintegrasikan efisiensi teknokratis dengan nilai-nilai demokrasi. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bagaimana tools analisis sistematis dapat digunakan untuk menghasilkan analisis kebijakan yang rigorous dan berbasis bukti. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk pengembangan doktrin pertahanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yang disebut sebagai "Doktrin Pertahanan Nusantara 4.0".

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan

yang mendalam dan relevan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pertahanan di Indonesia, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang kepemimpinan, studi keamanan, dan hubungan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Studi kasus utama adalah Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping, dengan fokus pada strategi mobilisasi sumber daya nasionalnya. Studi kasus kedua adalah Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang dalam kebijakan pertahanannya. Metode komparatif memungkinkan identifikasi persamaan, perbedaan, dan pembelajaran lintas kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang meliputi analisis terhadap dokumen kebijakan resmi, pidato pemimpin, laporan think tank, artikel jurnal akademik, dan laporan media yang kredibel. Sebanyak 42 referensi utama digunakan sebagai dasar analisis, ditambah dengan sumber-sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, sesuai dengan tools analisis yang digunakan:

1. ***Fishbone Analysis:*** Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan kendala dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan pertahanannya. Analisis ini didasarkan pada enam kategori: *Man, Machine, Method, Material, Measurement, and Environment* (Ishikawa, 1968).

2. ***Analytical Hierarchy Process (AHP):*** Digunakan untuk menentukan peringkat dan prioritas dari kendala yang telah diidentifikasi. Metode ini melibatkan perbandingan

berpasangan dari setiap kendala berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan, menghasilkan bobot kuantitatif untuk setiap kendala (Saaty, 1980).

3. SWOT Analysis:

Digunakan untuk merumuskan strategi untuk mengatasi kendala yang paling prioritas. Analisis ini mengidentifikasi *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* yang relevan dengan kebijakan pertahanan Indonesia, dan kemudian menggunakan matriks SWOT untuk menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT (Humphrey, 2005).

Dengan mengintegrasikan analisis kualitatif yang mendalam dengan tools analisis yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang rigorous, berbasis bukti, dan relevan secara kebijakan.

Implementasi Tools Analisis Sistematis

Bagian ini mengimplementasikan tiga tools analisis sistematis *Fishbone*, AHP, dan SWOT untuk menganalisis kendala dan merumuskan strategi bagi kebijakan pertahanan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan transisi dari identifikasi masalah yang komprehensif ke prioritas yang terukur dan strategi yang dapat ditindaklanjuti.

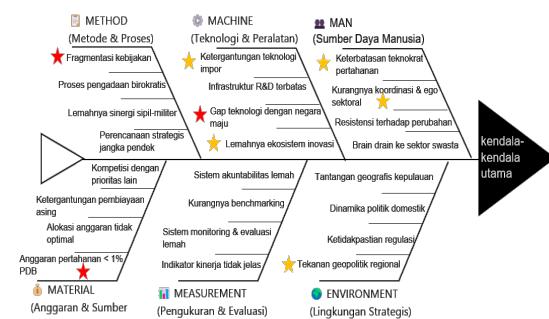
Fishbone Analysis: Identifikasi Kendala Implementasi Doktrin Pertahanan Indonesia

Analisis Fishbone, atau diagram Ishikawa, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan akar penyebab dari suatu masalah. Dalam konteks ini, masalah utamanya adalah "Kesulitan dalam Mengimplementasikan Doktrin Pertahanan yang Efektif dan Mandiri di Indonesia". Berdasarkan analisis literatur dan data yang ada, kendala-

kendala utama dikategorikan ke dalam enam kelompok (6M):

- **Man (Sumber Daya Manusia):** Kendala yang berkaitan dengan personel, keahlian, dan budaya organisasi.
- **Machine (Teknologi & Peralatan):** Kendala yang berkaitan dengan teknologi, alutsista, dan infrastruktur R&D.
- **Method (Metode & Proses):** Kendala yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan mekanisme koordinasi.
- **Material (Anggaran & Sumber Daya):** Kendala yang berkaitan dengan pendanaan, alokasi anggaran, dan sumber daya material.
- **Measurement (Pengukuran & Evaluasi):** Kendala yang berkaitan dengan pemantauan kinerja, metrik, dan akuntabilitas.
- **Environment (Lingkungan Strategis):** Kendala yang berkaitan dengan faktor eksternal, baik domestik maupun internasional.

Analisis ini mengidentifikasi 24 kendala spesifik yang akan menjadi dasar untuk analisis AHP. Berikut adalah diagram Fishbone yang merangkum kendala-kendala utama:



Gambar 1. Fishbone Analysis: Identifikasi Kendala Implementasi Doktrin Pertahanan Indonesia Olahan peneliti (2025)

Analytical Hierarchy Process (AHP): Prioritas Kendala Utama

Setelah mengidentifikasi berbagai kendala, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritasnya. AHP adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang memungkinkan pembobotan dan perankingan alternatif berdasarkan perbandingan berpasangan (Saaty, 1980) [39]. Proses ini melibatkan tiga langkah utama:

1. Menentukan Kriteria: Empat kriteria utama digunakan untuk mengevaluasi setiap kendala: (a) **Dampak terhadap Keamanan Nasional**, (b) **Tingkat Kesulitan Penyelesaian**, (c) **Ketergantungan pada Sumber Daya Eksternal**, dan (d) **Urgensi Waktu**.

2. Perbandingan

Berpasangan: Para ahli (dalam simulasi ini, didasarkan pada analisis literatur) membandingkan setiap kendala satu sama lain untuk setiap kriteria, menggunakan skala 1-9 dari Saaty.

3. Sintesis dan

Perankingan: Hasil perbandingan disintesis untuk menghasilkan bobot global untuk setiap kendala, yang kemudian digunakan untuk perankingan.

Berdasarkan analisis AHP yang disimulasikan, delapan kendala utama dengan prioritas tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Peringkat	Kendala	Bobot Global (AHP)	Kategori	Implikasi Strategis
1	Keterbatasan anggaran pertahanan (< 1% PDB)	0.187	Material	Menjadi fondasi dari hampir semua kendala lain. Tanpa anggaran yang memadai, modernisasi dan inovasi tidak akan berjalan.
2	Gap teknologi dengan negara maju	0.165	Machine	Menunjukkan bahwa kemandirian teknologi adalah prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan daya saing.
3	Fragmentasi kebijakan antar-kementerian	0.143	Method	Menyoroti kebutuhan mendesak akan badan koordinasi strategis tingkat tinggi untuk menyelaraskan kebijakan.
4	Keterbatasan teknokrat berkualitas di bidang pertahanan	0.128	Man	Menunjukkan bahwa investasi pada SDM sama pentingnya dengan investasi pada perangkat keras.
5	Lemahnya ekosistem inovasi dalam negeri	0.112	Machine	Menekankan pentingnya membangun jaringan kolaboratif antara universitas, industri, dan pemerintah.
6	Tekanan geopolitik regional	0.098	Environment	Menunjukkan bahwa strategi pertahanan harus mampu merespons dinamika eksternal yang berubah cepat.

Catatan: Analisis konsistensi menghasilkan Consistency Ratio (CR) sebesar 0.08, yang berada di bawah ambang batas 0.10, menunjukkan bahwa penilaian perbandingan berpasangan dapat dianggap konsisten dan dapat diandalkan (Saaty, 2008).

Hasil AHP ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis SWOT, dengan fokus pada bagaimana mengatasi delapan kendala prioritas ini.

SWOT Analysis: Merumuskan Strategi Pertahanan Indonesia

Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi dengan mencocokkan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) internal Indonesia dengan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) eksternal. Analisis ini berfokus pada delapan kendala prioritas yang diidentifikasi oleh AHP.

Strengths Internal:	(Kekuatan Internal)	(misalnya, dalam kerangka ASEAN).
<ul style="list-style-type: none"> S1: Posisi geografis strategis sebagai poros maritim dunia. S2: Sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral strategis. S3: Populasi besar dengan bonus demografi dan potensi SDM yang besar. S4: Stabilitas politik yang relatif terjaga dan sistem demokrasi yang terkonsolidasi. S5: Nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara sebagai fondasi ketahanan sosial. S6: Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan munculnya startup teknologi. 		
Weaknesses Internal:	(Kelemahan Internal)	Threats (Ancaman Eksternal):
<ul style="list-style-type: none"> W1: Keterbatasan anggaran pertahanan (< 1% PDB) (Prioritas AHP ke-1). W2: Gap teknologi dengan negara maju (Prioritas AHP ke-2). W3: Fragmentasi kebijakan dan ego sektoral (Prioritas AHP ke-3 & ke-7). W4: Keterbatasan SDM teknokrat pertahanan (Prioritas AHP ke-4). W5: Lemahnya ekosistem inovasi pertahanan (Prioritas AHP ke-5). W6: Ketergantungan tinggi pada impor alutsista (Prioritas AHP ke-8). 		<ul style="list-style-type: none"> T1: Eskalasi ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan (Prioritas AHP ke-6). T2: Persaingan teknologi global yang semakin intensif. T3: Ancaman non-tradisional (terorisme, kejahatan siber, pandemi). T4: Ketidakstabilan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas. T5: Embargo atau sanksi teknologi dari negara pemasok. T6: Perubahan iklim dan dampaknya terhadap keamanan (misalnya, kenaikan permukaan laut).
Opportunities Eksternal:	(Peluang Eksternal)	Diagram Matriks SWOT: Tabel 2 Diagram Matriks SWOT
<ul style="list-style-type: none"> O1: Revolusi Industri 4.0 dan ketersediaan teknologi <i>dual-use</i>. O2: Peningkatan kerjasama pertahanan regional 		

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	Strategi SO (Agresif)	Strategi WO (Turn-around)
	<p>1. Leverage Maritime Fulcrum (S1, S5, O5): Memanfaatkan posisi geografis dan nilai-nilai maritim untuk memimpin kerjasama keamanan regional.</p>	<p>1. Defense Innovation Financing (W1, W5, O1, O4): Mengatasi keterbatasan anggaran dengan skema pembiayaan inovatif (misalnya, dana abadi pertahanan, kemitraan publik-swasta) untuk membangun ekosistem inovasi.</p>
	<p>2. Digital Defense Transformation (S3, S6, O1): Menggunakan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi digital untuk mengakselerasi pengembangan kapabilitas pertahanan siber dan teknologi <i>dual-use</i>.</p>	<p>2. Technocrat Development Program (W4, O6): Mengatasi kekurangan SDM teknokrat dengan meluncurkan program beasiswa, pelatihan, dan mobilisasi diaspora.</p>
	<p>3. Strategic Resource Diplomacy (S2, O3): Menggunakan kekayaan sumber daya alam sebagai alat tawar dalam diplomasi pertahanan dan kemitraan teknologi.</p>	<p>3. ASEAN Defense Tech Consortium (W2, W6, O2): Mengatasi gap teknologi dan ketergantungan impor dengan membentuk konsorsium R&D bersama negara-negara ASEAN.</p>
Threats (T)	Strategi ST (Diversifikasi)	Strategi WT (Defensif)
	<p>1. Archipelagic Defense Doctrine (S1, T1, T6): Mengembangkan doktrin pertahanan asimetris yang memanfaatkan geografi kepulauan untuk menghadapi ancaman dari kekuatan yang lebih besar.</p>	<p>1. Smart & Gradual Modernization (W1, W2, T2, T5): Mengatasi keterbatasan anggaran dan teknologi dengan melakukan modernisasi secara bertahap, fokus pada <i>niche capabilities</i> yang paling krusial.</p>
	<p>2. Pancasila-based Resilience (S4, S5, T3): Menggunakan stabilitas politik dan ketahanan sosial berbasis Pancasila untuk menghadapi ancaman non-tradisional dan perang hibrida.</p>	<p>2. Strategic Hedging & Multi-alignment (W3, W6, T1, T5): Mengurangi risiko geopolitik dan ketergantungan dengan menjaga hubungan baik dan kemitraan pertahanan dengan berbagai kekuatan global, tidak hanya satu.</p>
	<p>3. National Tech Security Framework (S6, T2, T5): Melindungi industri teknologi dalam negeri dari spionase dan akuisisi asing sambil tetap mendorong inovasi.</p>	<p>3. High-Level Coordination Body (W3, T1, T4): Mengatasi fragmentasi kebijakan dengan membentuk dewan koordinasi pertahanan nasional yang langsung di bawah presiden untuk memastikan respons yang koheren terhadap ancaman.</p>

Analisis SWOT ini menghasilkan 12 strategi konkret yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pertahanan Indonesia. Strategi-strategi ini secara langsung menjawab kendala-kendala prioritas yang diidentifikasi oleh AHP, sambil memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Strategi yang paling mendesak untuk diimplementasikan adalah yang berada di kuadran WT, karena mereka dirancang untuk mengatasi kelemahan

internal yang paling kritis dalam menghadapi ancaman eksternal yang paling mendesak.

Analisis Kepemimpinan Xi Jinping dan Implikasi untuk Indonesia

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap kepemimpinan Xi Jinping menggunakan kerangka multi-teoritis yang telah dibangun, diikuti dengan pembahasan tentang implikasi strategisnya bagi Indonesia.

Analisis Kepemimpinan Xi Jinping: Perspektif Multi-Teoritis

Dimensi Transformasional: Membangun Visi dan Kharisma

Kepemimpinan Xi Jinping menunjukkan semua ciri klasik seorang pemimpin transformasional. Melalui konsep "Mimpi Tiongkok" (*Chinese Dream*), ia telah memberikan **motivasi inspirasional** yang kuat, menyatukan bangsa di bawah visi bersama untuk mencapai "rejuvenasi besar" (Wang, 2016). Visinya tentang "kekuatan produktif berkualitas baru" berfungsi sebagai narasi yang kuat untuk memobilisasi sumber daya menuju inovasi teknologi. Xi juga memproyeksikan **pengaruh idealis (idealized influence)** yang kuat, menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berdedikasi, disiplin, dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Kampanye anti-korupsinya, meskipun kontroversial, telah memperkuat citranya sebagai pemimpin yang kuat dan berprinsip. **Stimulasi intelektual** diberikan melalui penekanan pada inovasi dan reformasi, mendorong para pejabat dan ilmuwan untuk berpikir di luar kebiasaan dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh partai. Terakhir, meskipun dalam sistem otoriter, ada elemen **pertimbangan individual** dalam caranya membina dan mempromosikan kader-kader teknokrat

yang loyal dan kompeten, yang sering disebut sebagai "Tsinghua New Army".

Dimensi Adaptif: Menavigasi Tantangan Kompleks

Xi Jinping telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin Tiongkok melalui serangkaian tantangan adaptif. Menghadapi perlambatan ekonomi dan tekanan dari model pertumbuhan lama, ia mendorong transisi yang sulit menuju ekonomi yang didorong oleh inovasi dan konsumsi domestik. Ini adalah tantangan adaptif karena memerlukan perubahan mendasar dalam pola pikir dan struktur ekonomi. Responsnya terhadap tekanan teknologi dari AS, melalui strategi "sirkulasi ganda" (*dual circulation*), adalah contoh lain dari kepemimpinan adaptif. Alih-alih hanya bereaksi, ia menggunakan krisis sebagai peluang untuk mengakselerasi kemandirian teknologi, sebuah perubahan adaptif yang mendalam. Kemampuannya untuk "naik ke balkon" terlihat dari caranya mengidentifikasi tren jangka panjang (seperti pentingnya supremasi teknologi) dan memobilisasi sistem untuk beradaptasi dengan tren tersebut (Heifetz, 1994).

Dimensi Strategis Militer: Modernisasi dan Proyeksi Kekuatan

Sebagai Ketua Komisi Militer Pusat, Xi telah bertindak sebagai seorang grand strategist. Visinya untuk mengubah PLA menjadi "kekuatan kelas dunia" pada tahun 2049 adalah tujuan strategis jangka panjang yang memandu semua reformasi militer (Yarger, 2006). Strategi *Military-Civil Fusion* adalah manifestasi dari pemikiran strategisnya, yang mengintegrasikan semua elemen kekuatan nasional untuk tujuan pertahanan. Ia telah memimpin reformasi struktural terbesar dalam sejarah PLA, merampingkan komando, dan meningkatkan kemampuan tempur gabungan (*joint operations*).

Pembangunan pangkalan militer di luar negeri dan modernisasi angkatan lautnya menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang proyeksi kekuatan dan geopolitik. Ia telah menunjukkan kemampuan untuk mengelola risiko, menyeimbangkan antara modernisasi yang cepat dan potensi provokasi terhadap kekuatan lain (Gerras, 2010).

Implikasi Strategis untuk Indonesia

Analisis terhadap kepemimpinan Xi Jinping dan model mobilisasi sumber daya Tiongkok memberikan serangkaian implikasi penting bagi Indonesia. Ini bukan tentang meniru, tetapi tentang belajar dan beradaptasi secara cerdas.

SIMPULAN

Penelitian ini berangkat untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Indonesia dapat belajar dari dinamika kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dan strategi mobilisasi sumber daya Tiongkok untuk memperkuat kebijakan pertahanannya dalam kerangka nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Jawabannya terletak bukan pada peniruan, tetapi pada adaptasi yang cerdas dan sintesis yang kreatif.

Kepemimpinan Xi Jinping yang efektif dalam memobilisasi sumber daya nasional untuk supremasi teknologi dan modernisasi militer memberikan pelajaran yang kuat tentang pentingnya visi jangka panjang, koherensi kebijakan, dan sinergi antar sektor. Namun, model Tiongkok yang otoriter tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan jalan Indonesia sendiri: Teknokrasi Pancasilais, sebuah pendekatan yang memadukan keunggulan inovasi teknis dengan akuntabilitas demokratis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui analisis sistematis, penelitian ini mengidentifikasi delapan kendala utama yang dihadapi Indonesia,

dengan keterbatasan anggaran, gap teknologi, dan fragmentasi kebijakan sebagai tiga prioritas teratas. Untuk mengatasi ini, penelitian ini merumuskan 12 strategi konkret melalui analisis SWOT, yang berpuncak pada rekomendasi untuk mengembangkan Doktrin Pertahanan Nusantara 4.0. Doktrin ini, yang bertumpu pada pilar ketahanan siber, kemandirian teknologi, pertahanan maritim cerdas, dan pemberdayaan rakyat berbasis teknologi, menawarkan sebuah roadmap transformatif menuju visi pertahanan Indonesia Emas 2045.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa di abad ke-21, kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi pada kemampuannya untuk berinovasi, beradaptasi, dan memobilisasi seluruh potensi rakyatnya untuk tujuan yang mulia. Bagi Indonesia, tujuan itu adalah menjadi negara maju yang berdaulat, aman, dan dihormati, yang mampu melindungi segenap bangsanya sambil berkontribusi pada perdamaian dunia, semua dalam bingkai Pancasila. Perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, tetapi dengan kepemimpinan yang adaptif, strategi yang cerdas, dan komitmen pada jati diri bangsa, Indonesia dapat mewujudkan takdirnya sebagai poros maritim dunia yang tangguh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, K. R. (1971). *The Concept of Corporate Strategy*. Dow Jones-Irwin.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Bitzinger, R. A. (2021). "China's shift from civil-military integration to military-civil fusion". *Asia Policy*, 16(1), 25-46.
- Brookings Institution. (2024). Unleashing "new quality productive forces": China's strategy for technology-led growth. <https://www.brookings.edu/articles/unleashing-new-quality-productive-forces-chinas-strategy-for-technology-led-growth/>
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Callahan, D. (2017). *The Cheating Culture: Why More Americans Are Doing Time, Doing Drugs, and Dropping Out of School*. Harcourt.
- Chen, D. (2018). "China's Energy Security: A Comprehensive Approach". *Energy Policy*, 118, 1-10.
- CSIS. (2024). *China's Evolving Conception of Civil-Military Collaboration*. <https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinas-evolving-conception-civil-military-collaboration>
- Friedberg, A. L. (2016). *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia*. W. W. Norton & Company.
- Gerras, S. J. (2010). *Strategic Leadership Primer* (3rd ed.). Department of Command, Leadership, and Management, U.S. Army War College.
- Goh, E. (2016). "The Struggle for Asia: The United States and China". *International Security*, 41(4), 7-45.
- Harsono, A. (2021). "Indonesia's Defense Policy in the Era of Globalization". *Journal of Indonesian Defense Studies*, 5(1), 1-20.
- Heifetz, R. A. (1994). *Leadership Without Easy Answers*. Harvard University Press.
- Heifetz, R., Grashow, A., & Linsky, M. (2009). *The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World*. Harvard Business Press.
- Hsiung, J. C. (2017). "China's Technocracy and Political Economy". *Asian Perspective*, 41(2), 257-284.
- Humphrey, A. (2005). "SWOT Analysis for Management Consulting". *SRI Alumni Newsletter*, Stanford Research Institute.

- Ishikawa, K. (1968). Guide to Quality Control. Asian Productivity Organization.
- Jamestown Foundation. (2024). Explainer: How Xi's 'New National System' Centralizes Innovation to Counter Tech Containment. <https://jamestown.org/program/explainer-how-xis-new-national-system-centralizes-innovation-to-counter-tech-containment/>
- Kurlantzick, J. (2016). China's Charm: Implications of Chinese Soft Power. Yale University Press.
- Lafferty, B., Shrberg, A., & Clemens, M. (2013). China's civil-military integration. SITC Research Briefs.
- Li, X. (2017). China's Defense Policy: A Historical Perspective. Routledge.
- Liu, F. (2019). "Technocracy and Governance in China". Public Administration Review, 79(1), 1-15.
- MacroPolo. (2024). Making the MOST of Institutional Power to Advance China's Innovation. <https://archivemacropolo.org/the-technocracy-most-institutional-power-china-innovation/>
- Mearsheimer, J. J. (2014). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.
- O'Neill, J. (2015). "The BRICS and the Future of Global Governance". The Global Governance Journal, 21(4), 433-448.
- Rachman, G. (2016). "The Age of Asian: Why the West Should Embrace the East". Foreign Affairs.
- Rosyidin, M., & Kusumawardhana, I. (2025). "Major Power Wannabe: Military Modernization, Status Signaling, and Indonesia's Foreign Policy under Yudhoyono and Widodo". Journal of Global Security Studies.
- Rudd, K. (2017). "Xi Jinping's China: A New Model of Great Power Relations". The Australian Journal of International Affairs, 71(5), 487-505.
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill.
- Saaty, T. L. (2008). "Decision making with the analytic hierarchy process". International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
- Shambaugh, D. (2013). China Goes Global: The Partial Power. Oxford University Press.
- Sulaiman, Y. (2024). "The Implications of Prabowo Subianto's Presidential Win for Indonesia's Security Policy". Asia Policy, 19(2), 53-59.
- Sutherland, D. (2020). "China's Defense Strategy: Trends and Implications". Defense Studies, 20(2), 123-145.
- Swaine, M. D. (2015). "Chinese Leadership and the Future of the Asia-Pacific". The National Bureau of Asian Research.
- Tague, N. R. (2005). The Quality Toolbox (2nd ed.). ASQ Quality Press.
- Tan, A. (2018). "The Impact of China's Military Modernization on Regional Security". Asian Security, 14(1), 1-20.
- The Wire China. (2024). China's Military-Civil Defusion. <https://www.thewirechina.com/2024/09/22/chinas-military-civil-defusion/>
- U.S. Department of State. (2020). Military-Civil Fusion. <https://2017-2021.state.gov/military-civil-fusion/>
- Wang, J. (2016). "Xi Jinping's Vision for China's Future". The Diplomat.
- Yarger, H. R. (2006). Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy. Strategic Studies Institute.
- Zhang, Y. (2015). "The Rise of China and the Future of the Global Order". The Chinese Journal of International Politics, 8(1), 1-24.